

BULETIN

PARLEMENTARIA

NOMOR 906/II/V/2016



DPR PUTUSKAN KAP PEMERIKSA PENGELOLAAN KEUANGAN BPK

Fahri Hamzah Hadiri
Acara Managing Disruption
Amidst Global Change

hal 5

DPR Segera
Selesaikan
Lima RUU

hal 7

Indonesia
Perlu Terapkan
Wisata Halal

hal 20

GRATIS
TIDAK DIPERJUALBELIKAN



Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Marwan Cik Asan

DPR Putuskan KAP Pemeriksa Pengelolaan Keuangan BPK

Rapat Paripurna di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (29/4) memutuskan Kantor Akuntan Publik (KAP) Wisnu B. Soewito dan Rekan menjadi KAP yang ditugaskan untuk melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2015.

"Apakah KAP Wisnu B. Soewito dan Rekan disetujui menjadi KAP untuk melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan dan tanggung jawab keuangan BPK tahun 2015," tanya Wakil Ketua DPR RI Bidang Korekku, Taufik Kurniawan (F-PAN) kepada seluruh peserta rapat yang hadir. Jawaban "Ya" pun menggema.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Marwan Cik Asan melaporkan di depan Rapat Paripurna, pada tanggal 20 Januari 2016, BPK telah mengajukan tiga

calon KAP, yakni KAP Wisnu B Soewito dan Rekan, KAP Sriyadi Elly Sugeng dan Rekan, dan KAP Husni, Mucharam, dan Rasidi.

Pada saat yang sama, Menteri Keuangan juga mengajukan tiga calon KAP untuk melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan dan tanggung jawab keuangan BPK tahun 2014, yakni KAP Heliantono dan Rekan, KAP Kanaka Puradiredja, Suhartono, dan KAP Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang dan Ali.

"Terhadap kedua surat tersebut, Bamus DPR memutuskan bahwa Komisi XI DPR diberikan penugasan untuk melakukan pembahasan penunjukkan KAP untuk melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan dan tanggung jawab keuangan BPK tahun 2015," jelas Marwan.

Politisi F-PD itu menambahkan, pihaknya telah melakukan *fit and proper*

test pada 12 April 2016 kepada lima KAP, yakni KAP Wisnu B Soewito dan Rekan, KAP Sriyadi Elly Sugeng dan Rekan, KAP Husni, Mucharam, dan Rasidi, KAP Heliantono dan Rekan, dan KAP Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang dan Ali.

"Sedangkan satu KAP, yakni KAP Kanaka Puradiredja, Suhartono tidak hadir dalam proses *fit and proper* yang dimaksud," imbuh Marwan.

Marwan kembali memaparkan, pada 18 April 2016, rapat internal Komisi XI DPR secara musyawarah untuk mufakat memutuskan KAP Wisnu B. Soewito dan Rekan disetujui menjadi KAP untuk melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan dan tanggung jawab keuangan BPK tahun 2015.

"Kami mengharapkan agar Rapat Paripurna DPR RI dapat memberikan persetujuannya," kata politisi asal dapil Lampung II itu mengakhiri laporannya. ■

(sf), foto: Rumi/hr



Tenaga Kerja Ilegal Ancam Kesejahteraan WNI



Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon

Peringatan Hari Buruh Internasional 1 Mei 2016, bisa menjadi momen bagi banyak pihak untuk memperbaiki tidak hanya sistem perburuhan tapi juga sistem ketenagakerjaan. Karena dua sistem ini saling berkaitan satu sama lainnya.

Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon, menekankan bahwa serangan tenaga kerja dan buruh kasar asing yang masih berstatus ilegal menjadi permasalahan bagi Warga Negara Indonesia (WNI). Pasalnya, masih banyak WNI yang mencari lapangan pekerjaan, sementara industri dalam negeri masih belum mengatasi.

"Masuknya banyak warga asing yang bekerja di Indonesia sebagai buruh kasar, itu ancaman langsung

bagi buruh di Indonesia. Salah satu tujuan utama dari investasi asing adalah menciptakan lapangan kerja bagi warga negara Indonesia." ungkap Fadli dalam rilisnya yang diterima oleh Parlementaria, Senin (2/5)

Dia mengkhawatirkan tenaga kerja asing yang mulai berbondong-bondong datang ke Indonesia, sebagai penjajahan berkedok investasi. "Buruh asing datang secara masif ke Indonesia, sebagai syarat melekat dari investasi yang ditanamkan, itu sama saja dengan penjajahan." tukasnya.

Lebih jauh, Politisi dari Fraksi Partai Gerindra ini mengungkapkan, warga asing yang menjadi tenaga kerja dan buruh kasar banyak yang ilegal.

Fadli menyarankan pemerintah harus membatasi dan menyaring tenaga kerja asing yang masuk ke

Indonesia. Namun, jika mereka yang punya keahlian khusus, sedangkan WNI belum ada yang menguasainya, hal tersebut dianggapnya tidak jadi masalah. Namun ke depan, Pemerintah harus mempersiapkan generasi bangsa yang mampu menguasai keahlian strategis.

"Tapi jangan sampai pekerjaan domestik yang masih dapat dikerjakan oleh tenaga kerja Indonesia diberikan juga kepada warga asing. Jangan sampai buruh domestik tertindas lantaran pemerintah tidak tegas." tandasnya.

Dia mengingatkan saat ini interaksi ekonomi semakin terbuka, negara harus semakin hati-hati terhadap berbagai ancaman. "Salah satunya ancaman buruh asing yang akan mengancam pula kesejahteraan buruh Indonesia," ujar Fadli. ■

(ele), foto: dok/mr

PENGAWAS UMUM

Pimpinan DPR-RI

PENANGGUNG JAWAB/KETUA PENGARAH

Dr. Winantuningtyastiti, M.Si
(Sekretaris Jenderal DPR-RI)

WAKIL KETUA PENGARAH

Dra. Damayanti, M.Si,
(DEPUTI PERSIDANGAN)

PIMPINAN REDAKSI

Drs. Suratna, M.Si
(Kabag Media Cetak & Media Sosial)

WK. PIMPINAN REDAKSI

Dra. Tri Hastuti
(Kabag Media Cetak)
Ahyar Tibi, S.H
(Kabag Media Analisis)
Insan Abdirrohman, S.H, M.Si
(Kabag MedSos dan Website)

REDAKTUR

Mastur Prantono, Nita Juwita, S.Sos

SEKRETARIS REDAKSI

Suciati, S.Sos, Bagus Mudjiharjanto

ANGGOTA REDAKSI

Agung Sulistiono, SH,
Rahayu Setiowati, Muhammad Husen,
Sofyan Efendi, Virgianne Meiske Patuli,
Devi Iriandi, Hendra Sunandar,
Surahmat Eko, Ria Nur Mega

REDAKTUR FOTO

Eka Hindra, Iwan Armanias

FOTOGRAFER

Rizka Arianindya, Naefuroji, M. Andri Nurdiansyah,
Andi M. Ilham, Jaka Nugraha, Runi Sari Budiati,
Jayadi Maulana, Arief Rachman,
R. Kresno P.D Moempoeni, Azka Restu Fadilah

ADMINISTRASI FOTO

Hasri Mentari

ALAMAT REDAKSI/TATA USAHA

Bagian Media Cetak & Media Sosial DPR RI

Gedung Nusantara II Lt. 3

Jl. Jend. Gatot Soebroto-Senayan, Jakarta

Telp. (021) 5715348, 5715350

Fax. (021) 5715341,

e-mail: dpr.pemberitaan@gmail.com

www.dpr.go.id/berita

PENERBITAN & DISTRIBUSI

PIMPINAN PENERBITAN

Djustiawan Widjaya, S.Sos. M.AP
(Kabag Penerbitan)

WK. PIMPINAN PENERBITAN

Mediantoro, SE
(Kabag Produksi),
Pesta Evaria Simbolon, SE. M.Si
(Kabag Distribusi)

STAFF PRODUKSI

Eko Murdiyanto, Barliansyah

SIRKULASI

Abdul Kahfi, S.Kom

Telp. 021-571 5697

Fax. 021-571 5421

Email

penerbitandpr@gmail.com

(isi berita dan materi foto
di luar tanggung jawab Bagian Penerbitan)



Dubes Tiongkok Diminta Penjelasan Terkait Tenaga Kerja Asing

Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon, menanggapi maraknya kehadiran pekerja ilegal asal Tiongkok di Indonesia, dia mendesak Kementerian Luar Negeri RI, untuk meminta penjelasan dari Kedutaan Besar Tiongkok.

"Harus ada penjelasan diplomatik dari pemerintah Tiongkok mengenai warga negaranya yang masuk ke Indonesia secara masif dan ilegal," papar Fadli dalam rilis yang diterima Parlemen, Senin (2/5).

Fadli menganggap serbuan pekerja asing ilegal ke dalam negeri dengan jumlah yang besar merupakan persoalan yang janggal. Dia menghendaki permasalahan ini harus diatasi lewat jalur hukum.

"Sangat aneh jika ada pekerja asing dalam jumlah banyak masuk ke wilayah Indonesia tanpa paspor dan izin bekerja.



Sejumlah tenaga asing sedang menikmati makan di salah satu Perusahaan

Ini jelas melanggar peraturan, dan harus ada tindakan hukum," tegasnya.

Politisi dari Fraksi partai Gerindra ini menilai, serbuan pekerja ilegal asal Tiongkok di Indonesia tidak bisa dianggap hal yang remeh. Sudah menjadi peraturan, bagi WNA yang berada di Indonesia harus memiliki paspor atau visa.

"Ini permasalahan serius. Setiap warga asing yang masuk ke dalam wilayah Indonesia harus disertai paspor dan izin kerja," tandas Fadli.

Dia berpendapat, penjelasan dari pemangku kepentingan terkait serbuan tenaga asing Tiongkok ke Indonesia secara ilegal merupakan hal yang sangat diperlukan.

"Hal ini penting untuk menghindari kesalahpahaman dan asumsi-asumsi keliru yang berkembang di publik

mengenai serbuan tenaga asing Tiongkok ke Indonesia secara ilegal," jelas Fadli.

Dia menekankan, agar pemerintah selektif dalam menerima pekerja asing. "Harus yang benar-benar memiliki keahlian khusus. Tenaga buruh kasar, tidak perlu dibuka untuk warga asing," tegas Fadli. ■

(eko), foto: Naefuroji/hr.

Pemerintah Tidak Perlu Meminta Maaf ke Keluarga PKI

Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengatakan pemerintah tidak perlu meminta maaf kepada keluarga anggota PKI, karena jika hal tersebut dilakukan, nantinya akan banyak lagi gugatan kepada Pemerintah untuk meminta maaf.

"Tidak bisa permintaan maaf itu. Kalau presiden lakukan hal itu, akan ada banyak gugatan, karena saya menilai PKI yang melakukan pemberontakan terhadap pemerintah Indonesia pada tahun 1948 dan 1965," ujarnya saat menerima beberapa perhimpunan gerakan Anti-Komunis, di Gedung DPR, Jakarta, (2/5).

Fadli menambahkan, PKI bukan hanya melakukan pemberontakan,

namun PKI juga turut serta melakukan pembantaian terhadap jenderal-jenderal TNI, "Jadi tidak bisa pemerintah meminta maaf kepada PKI. Apa urusannya? Yang memberontak itu PKI, yang melakukan pembantaian juga PKI," tegasnya.

Sementara itu, menurut Ketua Gerakan Bela Negara Anti-Komunis PKI, Budi Sujana saat audiensi, menjelaskan, pernyataan sisa-sisa anggota PKI bahwa PKI tidak akan hidup kembali itu hanyalah *lip service* belaka.

"Kita terlena dengan taktik dan strategi mereka (PKI) bahwa tidak akan hidup. Kita terlalu cepat melupakan kesalahan mereka," katanya.

Padahal jelas Budi, PKI sangat ulet dan sangat memegang teguh tujuannya. PKI,



Wakil Ketua DPR Fadli Zon saat menerima Perhimpunan Gerakan Anti Komunis

pada umumnya tidak mau kalah atas tujuan yang hendak dicapainya.

"Mereka ulet, mereka pegang teguh tujuan dan bahkan lebih kokoh dibanding tentara," ujarnya. ■

(rmm), Foto: Rumi/hr



Fahri Hamzah Hadiri Acara Managing Disruption Amidst Global Change

Wakil Ketua DPR RI Korkesra Fahri Hamzah menghadiri sekaligus menjadi pembicara dalam acara yang digelar oleh Selasar.com dengan tema “*Managing Disruption Amidst Global Change*”, dalam rangka mencari masukan tentang bagaimana Indonesia bisa unggul di tengah gelombang *disruptive innovation* dan dinamika perdagangan kawasan, di ruang *Operation Room* Gedung Nusantara Komplek DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (28/4).

Pada kesempatan itu Fahri Hamzah menyampaikan bahwa pada *trend* masa depan, negara bisa saja kehilangan penggemarnya, karena ditemu-kan negara baru yang *virtual* sifatnya. Oleh karena itu jika ditanya bagaimana

Indonesia bisa lebih unggul, maka sebetulnya Indonesia dalam persepsi seperti itu harus mengalami perubahan makna.

Otoritas negara di dalam industri digital jangan terlalu mengekang, seperti UU ITE yang banyak sisi kebablasannya. Karena UU itu dibuat pada saat transisi ketika memang Undang-undangnya belum ada, jadi negara seperti gelagapan, selain itu juga UU ini banyak memakan korban di kemudian hari, maka UU perlu ada amandemen baru.

Negara yang kuat adalah jika masing-masing anggota rakyat atau individu-individunya bisa bertindak lebih kuat dari pada negara, seperti yang terlihat saat ini dimana-mana. Orang-orang yang semula dianggap

'aneh' karena ide-idenya, justru malah bisa diterima di dalam segmen pasar.

"Orang seperti Mark Zuckerberg (co-founder Facebook-red), memiliki penduduk paling banyak saat ini yakni sekitar 1 Milyar lebih, dan lebih besar dari China Daratan. Jadi Presiden

jauh lebih relevan dari pada upacara-upacara formil yang ada dalam kehidupan sosial lama.

"Oleh karena itu perlu diantisipasi dan diberikan jalan supaya tidak bingung, contoh konkrit seperti dalam masalah *Uber* dan *BlueBird* kemarin, menurut saya diantara sebabnya adalah adanya ambiguitas dalam negara dan kabinet, tidak ada persepsi yang sama. Di satu sisi Menkominfo lebih cenderung melihat *market* tidak boleh di stop, karena itu masa depan kita, yang menghidupkan negara adalah *market*, dan sebaliknya negara tidak bisa meng-hidupkan *market*. Kita sudah tidak punya sumber daya alam untuk membayar rakyat kita, ini Indonesia baru yang SDAnya sudah tidak bisa di eksploitasi terus menerus, yang bisa di eksploitir adalah manusia-manusia dengan kebebasannya menciptakan *income*, dan *income* itu dipakai untuk membiayai negara," jelas Fahri.

"Kita memerlukan negara baru dengan falsafah baru yang pro pemilihan digital, sehingga betul-betul kita menyaksikan lahirnya realitas baru, yang tidak hanya mengatur kelompok tertentu, tetapi menjadi payung bagi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia," sambungnya.

Moderator acara ini adalah Miftah Nur Sabri Sutan Mangkudun, juga dihadiri oleh Menkominfo Rudiantara, Dirut BEJ Tito Sulistio, Perwakilan Presdir Blue Bird, CEO Uber Alan Jiang, CEO bubu.com Shinta Dhanuwardoyo, dan Ekonom Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI Fithra Faisal. ■



Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menjadi pembicara dalam seminar yang digelar Selasar.com

terkuat saat ini adalah Mark Zuckerberg," seloroh Fahri yang disambut tawa para peserta yang hadir.

Di bagian lain, Fahri mengatakan, diantara sebab seringnya terjadi begitu banyak kekacauan saat ini, karena negara kurang antisipatif dengan pertumbuhan dan perkembangan rakyatnya. Orang tidak harus merintis menjadi pengusaha lalu kemudian menjadi pejabat, tapi harus banyak pejabat yang mau dan rajin membaca, dan juga mengerti bagaimana cara mengantisipasi *trend* dari kebebasan sipil saat ini. Kebebasan anak-anak muda generasi Y dan generasi Z yang menciptakan kehidupannya sendiri, dimana kadang-kadang kehidupannya yang *virtual*



KAP Wisnu B. Soewito dan Rekan Diharapkan Periksa BPK Transparan dan Akuntabilitas

Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan berharap agar Kantor Akuntan Publik (KAP) Wisnu B Soewito dan Rekan dapat melakukan pemeriksaan terhadap keuangan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) secara benar sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan dan prinsip-prinsip transparansi serta akuntabilitas.

Demikian dikatakannya, saat menanggapi terpilihnya KAP Wisnu B Soewito dan Rekan dalam keputusan Komisi XI DPR yang bertugas menyeleksi KAP untuk melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan dan tanggung jawab keuangan BPK Tahun 2015. Hal ini pun sudah diputuskan dalam Rapat Paripurna di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (29/4).

Taufik menjelaskan bahwa hasil *fit and proper test* di Komisi XI terhadap KAP yang diajukan BPK dan Menteri Keuangan, sudah sesuai



Pimpinan DPR RI di sidang paripurna

dengan aturan dan mekanisme yang berlaku. Pasalnya, Komisi XI memiliki kewenangan untuk mengaudit hasil laporan keuangan BPK. Selain itu, dalam memutuskan KAP yang ditunjuk memeriksa laporan keuangan BPK, semua didasari asas kompetensi, kredibilitas, dan profesionalisme.

"Audit terhadap laporan keuangan BPK nantinya meliputi semua aspek termasuk transparansi dan akuntabilitas. Setiap tahun KAP yang mengaudit BPK

juga berganti-ganti untuk menjaga independensi dan melalui uji kepatutan dan kelayakan oleh Komisi XI," kata politisi F-PAN itu.

Taufik menambahkan, dengan semakin banyaknya tuntutan atas transparansi dan tata kelola keuangan yang benar, DPR RI memandang KAP mempunyai posisi strategis dalam rangka menjaga objektivitas dan independensi laporan keuangan yang ada.

Jadi, lanjut Taufik, hal yang paling prinsipil dalam rangka melakukan audit terhadap laporan BPK adalah objektivitas dan independensi di tengah rasionalisasi terkait permasalahan fiskal yang terbatas dan itu salah satu alasan KAP diperlukan.

"Sehingga laporan yang dihasilkan dapat memenuhi prinsip-prinsip pelaporan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan," harap politisi asal dapil Jawa Tengah itu. ■

(sf), Foto: Rumi/hr

Peringati Hardiknas, Ketua DPR Dorong Edukasi Parlemen

Ketua DPR RI Ade Komarudin memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang ikut serta memajukan pendidikan Indonesia. Akom, panggilan Ade Komarudin juga secara khusus memberikan penghargaan kepada para pendidik yang telah berjuang tanpa lelah untuk mencerdaskan generasi muda Indonesia.

"Selaku Ketua DPR RI, saya memberikan apresiasi yang tinggi

kepada seluruh pihak yang ikut serta memajukan pendidikan Indonesia dan mencerdaskan generasi bangsa. Saya juga memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya, kepada seluruh pendidik di seluruh Indonesia yang telah berjuang tanpa lelah, memberi inspirasi dan membangkitkan asa setiap anak didiknya agar menjadi manusia yang berkarakter dan memiliki ilmu pengetahuan," ujar Akom di Hari Pendidikan Nasional, Senin (2/5).

Akom menekankan, tantangan generasi Indonesia di masa yang akan datang akan jauh lebih berat dibandingkan saat ini. Oleh karena itu, pendidikan di Indonesia harus diarahkan pada proses pembentukan manusia yang unggul dan berkarakter.

"Pendidikan harus melahirkan generasi yang tidak hanya unggul dalam aspek akademis, namun juga harus menjadi *leader* (pemimpin) di bidangnya masing-masing," tutur Akom.



Menurutnya, Indonesia akan menjadi bangsa yang disegani dunia dan akan berhasil dalam berbagai kompetisi era global jika tinggi kualitas manusianya. "Manusia yang terdidik dan tercerahkan adalah kunci kemajuan bangsa," tambahnya.

Pada peringatan Hardiknas kali ini, Akom juga mendorong peningkatan edukasi parlemen. Menurutnya, edukasi parlemen ini

sangat diperlukan, agar generasi muda kita memahami dengan baik proses politik dan proses pembuatan undang-undang yang dilakukan oleh DPR.

"Contohnya, bagaimana DPR dan



Ketua DPR RI Ade Komarudin bersama siswa-siswi SMP

pemerintah membahas RUU Perbukuan dan RUU Kebudayaan yang tahun ini masuk dalam daftar prolegnas. Ini harus dipahami oleh generasi muda kita. Bahwa pembahasan sebuah undang-undang itu

tidak hanya dilakukan oleh DPR, namun juga bersama dengan pemerintah," terangnya.

Ditambahkannya, edukasi parlemen ini sangat diperlukan bagi generasi muda saat ini, karena merekalah nantinya yang akan menjadi pemimpin-pemimpin dimasa yang akan datang.

"Saya dengan tangan terbuka dan akan dengan senang hati menerima delegasi pelajar dari seluruh penjuru

Indonesia untuk datang dan berkunjung ke DPR RI serta melihat, mengikuti dan mempelajari proses politik dan legislasi yang dilakukan oleh DPR RI," pungkasnya. ■

(hs), Foto: Rumi/hr

DPR Segera Selesaikan Lima RUU

Lima rancangan undang-undang (RUU) akan segera diselesaikan pembahasannya pada Masa Sidang V, Mei 2016. Kelimanya adalah RUU Penyelenggaraan Haji dan Umrah, RUU Pilkada, RUU Paten, RUU Merek, dan RUU Minuman Beralkohol.

Ketua DPR RI Ade Komarudin menyampaikan hal tersebut dalam pidato Penutupan Masa Sidang IV, Jumat (29/4). "DPR telah memutuskan RUU usul DPR untuk dibahas bersama



Ketua DPR RI Ade Komarudin

dengan pemerintah, yaitu RUU tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. DPR juga terus bekerja keras menyelesaikan pembahasan revisi UU No.8 tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota yang diperkirakan paling lambat pada masa persidangan ke V akhir Mei 2016 sudah dapat diambil keputusan."

Ketua DPR juga menyebutkan, DPR sedang melakukan penyusunan 10 RUU dan melanjutkan pembahasan 15 RUU yang akan menjadi prioritas bersama dengan pemerintah. Sementara RUU yang masih dalam proses harmonisasi di Badan Legislasi ada 2 RUU. Sedangkan RUU yang saat ini masih menunggu surat

presiden mencapai 5 RUU.

"Pimpinan DPR terus menghimbau kepada pimpinan alat kelengkapan DPR dan anggota DPR yang terlibat dalam pembahasan RUU agar tetap memprioritaskan kualitas RUU disamping kuantitas RUU," jelas Akom-sapaan akrab Ade Komarudin- di hadapan Rapat Paripurna DPR.

Sementara itu, menyangkut RUU Pengampunan Pajak yang kini sedang menjadi perbincangan publik, DPR telah memprioritaskan pembahasannya pada awal masa sidang V yang akan datang. "Mudah-mudahan segera dapat diselesaikan," ucap Akom singkat. ■

(mh), foto: Iwan/hr



Komisi VIII Pantau Kesiapan Daerah Antisipasi Bencana

M. Lutfi politisi dari F-Partai Golkar yang juga Putra Daerah dari Dapil NTB memimpin Kunjungan Kerja Spesifik ke Provinsi Nusa Tenggara Barat, tim kunjungan kali ini diikuti pula oleh delapan orang anggota guna meninjau sejumlah daerah yang berpotensi rawan gempa bumi, gelombang pasang dan banjir.

Dalam pertemuannya dengan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana (BPBD) Prov. NTB Ridho Ahyana beserta jajaran, Tim Kunjungan Komisi VIII DPR ingin mengetahui, terkait tindak lanjut program kesiapsiagaan dan rencana aksi daerah dalam pengurangan risiko bencana di Prov. NTB. Jum'at (9/4).

"Apakah Provinsi NTB telah menyiapkan dan menyusun Perda tentang penanggulangan bencana, dan rencana aksi daerah dalam pengurangan risiko bencana?" tanya M. Lutfi.

Menurut Lutfi, indeks rawan bencana yang terjadi ada dilevel tinggi, artinya diwilayah yang termasuk daerah tidak aman dari bencana alam, "Ada sebelas provinsi yang perlu diwaspadai terkait bencananya, seperti gempa bumi, banjir bandang, gelombang pasang, kekeringan dan erupsi gunung," jelas Lutfi.

Lutfi mencontohkan, pada akhir tahun lalu terjadi peristiwa erupsi Gunung Rinjani yang membuat panik masyarakat disekitarnya, "Aktifitas masyarakat terganggu dengan peristiwa erupsi gunung Rinjani. Itu berdampak besar. Oleh karena itu peran pemerintah dalam penanganan bencana sangatlah penting," tegas Lutfi.

Menanggapi hal tersebut, dalam penjelasannya, Kepala Pelaksana BPBD Prov. NTB Ridho Ahyana menerangkan sangat mengapresiasi masukan dari Komisi VIII DPR terkait penanggulangan bencana. Dan saat ini, tambah Lutfi, BPBD Prov. NTB tengah mempersiapkan antisipasi terkait bencana kekeringan yang akan terjadi.

"BPBD Prov. NTB tengah bersiap akan datangnya bencana kekeringan dan itu yang sedang kami bahas. Untuk bencana banjir, kami sudah banyak berbuat dilapangan,

dan Alhamdulillah semuanya berjalan lancar," terang Ridho.

Lebih lanjut, ia menjelaskan, jika di bulan Mei nanti, akan terjadi kekeringan, "Ada 300 desa yang kami perhatikan akan mengalami kekeringan. "Kami terus melatih dan menginformasikan kepada warga desa tentang cara dalam menghadapi bencana kekeringan.

Kita akan didik masyarakat agar siap menghadapi bencana," jelas Ridho.

Sementara

itu, anggota Tim Kunjungan Komisi VIII Kuswiyanto mengapresiasi langkah BPBD Prov. NTB dalam mengantisipasi bencana, "Saya apresiasi antisipasi penanganan bencana dari BPBD untuk melindungi seluruh tumpah darah Indonesia. Ini kan tugas dari negara, tugas dari pemerintah," tegas Kuswiyanto yang juga politisi dari Fraksi PAN ini.

Kuswiyanto menambahkan, Indonesia adalah negara dengan rawan bencana, dan NTB termasuk didalamnya, sehingga diharapkan pemerintah dapat merumuskan dengan jelas dalam memberikan perlindungan kepada rakyatnya dari bahaya yang ditimbulkan oleh bencana.

"Menurut saya rumusnya adalah kalau sementara ini belum ada kemampuan untuk melindungi, untuk menjaga dari berbagai kemungkinan, rakyatnya ini harus diajari untuk ramah dengan bencana. Yang kedua, kita ini kan lagi prihatin, kita meminta kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana untuk membuat peta bencana nasional termasuk untuk NTB. Peta bencananya ini bagaimana?. Karena dari peta bencana ini kita akan melihat secara utuh secara komprehensif, sesungguhnya di NTB ini bencana apa yang sering terjadi?" tanya Kuswiyanto.

Disamping itu, kata Kus, ada dampak secara luas, pertama, dampaknya bagi

manusia, kedua, dampak bagi alam, ketiga adalah dampak bagi tumbuhan, binatang, dan lainnya. "Setelah itu baru bisa dianggakan, kira-kira



Anggota Komisi VIII DPR M.Lutfi

dalam menanggulangi bencana itu akan diatasi dengan model bagaimana, kemudian ada pembagian tugas pusat melakukan apa, provinsi melakukan apa, kabupaten kota melakukan apa," ujarnya.

Dari pemaparan BPBD Prov. NTB, menurut Kuswiyanto, diketahui, bahwa ternyata bencana yang sering terjadi pertama adalah banjir, "Sekarang kalau banjir maka harus dibuat peta rawan bencananya, terjadi berapa tahun sekali, sungai itu apa tergolong sungai nasional, sungai provinsi, atau sungai kabupaten. Baru setelah itu, pemerintah membuat *grand design*, kalau nasional yang dibuat oleh pemerintah pusat. Kalau provinsi dibuat oleh provinsi, kalau kabupaten kota itu dibuat oleh kabupaten," tandasnya.

"Dari *grand design* itu bisa dilihat seberapa kemampuan untuk mengatasinya dan kira-kira akan diatasi selama berapa tahun, peta itu harus betul-betul ada sehingga untuk mengatasinya bukan hanya sekedar dimensi jangka pendek tetapi jangka panjang, sehingga dalam mengatasi sekali itu bisa langsung dirasakan dan tidak akan terjadi kembali lagi," tambahnya.

Usai melakukan diskusi, Tim Kunjungan Kerja Spesifik beranjak dari ruang pertemuan untuk meninjau salah satu anak sungai di daerah Jempong, Mataram, Nusa Tenggara Barat. ■



Paripurna DPR Lantik Tiga Anggota Dewan PAW

Paripurna DPR RI masa sidang IV 2015-2016 melantik tiga Anggota DPR Pergantian Antar Waktu (PAW), di Gedung DPR, Jumat (29/4). Paripurna yang dipimpin oleh Wakil Ketua Taufik Kurniawan ini, sekaligus menutup masa sidang dan memasuki masa reses.

PAW Anggota Dewan yang diganti asal Partai Persatuan Pembangunan Irna Narulita dengan pengganti Abdul Halim. Dari Partai Demokrat Mukhniarty diganti Sayed Abubakar A. Assegaf. Dari Partai Hati Nurani Rakyat Dewie Yasin Limpo diganti Mukhtar Tompo. PAW tersebut



Pelantikan tiga anggota DPR Pergantian Antar Waktu (PAW)

sesuai dengan Keppres 42/P,44/P,45/P Tahun 2016 15 April 2016.

Pengambilan sumpah dipandu oleh

Ketua DPR RI Ade Komarudin, sumpah yang diucapkan mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia. "Sumpah ini adalah janji terhadap Tuhan Yang Maha Esa," ujar Akom membacakan naskah sumpah pelantikan.

"Demi Allah saya bersumpah, bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat," ujar tiga Anggota Dewan yang sedang dilantik serentak.

Setelah pembacaan sumpah selesai lima pimpinan DPR secara bergantian memberikan ucapan selamat kepada tiga Anggota Dewan PAW. ■

(eko), Foto: Jaka/hr



Wakil Ketua Komisi X DPR Sutan Adil Hendra

Komisi X Minta Pemerintah Terus Tingkatkan Sarana dan Prasarana UN

energi listrik," papar Sutan. Namun demikian, Komisi X meminta Kemendikbud untuk merancang dan membahas penyamaan Ujian Nasional

Berbasis Komputer (UNBK) dan Ujian Nasional Berbasis Kertas Pensil (UNKP) di masa mendatang.

Terkait masalah guru honorer, Komisi X meminta Kemendikbud untuk melakukan koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait, agar ada penyeimbangan rasio jumlah guru dan siswa sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan (SNP).

"Sehingga terjadi pemerataan pemenuhan kebutuhan guru di daerah dengan memperhatikan sistem seleksi penerimaan dan pengangkatan guru honorer," ujar Sutan.

Berkenaan dengan hasil Uji Kompetensi Guru (UKG), ini menjadi acuan bagi

pemerintah untuk memberikan jenis pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan guru. Komisi X meminta Kemendikbud untuk terus melakukan sosialisasi dan memberikan laporan perkembangan pelaksanaan program guru pembelajar.

Menyangkut soal sertifikasi guru, Komisi X DPR meminta Kemendikbud untuk meningkatkan jumlah penerima program Pendidikan dan Pelatihan Profesi Guru (PL-PG) yang diselenggarakan pemerintah. Program ini bertujuan agar jumlah guru yang memiliki sertifikat pendidikan meningkat sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Dalam rangka penjaminan mutu pendidikan khususnya peningkatan kualitas guru, Komisi X mendesak Kemendikbud agar program sertifikasi guru tidak dikenakan pungutan biaya yang dibebankan kepada guru peserta PL-PG tetapi seluruh biaya ditanggung oleh pemerintah. ■

Komisi X DPR RI menggelar rapat kerja dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Selasa (26/4). Dalam raker ini menyimpulkan tentang beberapa persoalan berkaitan dengan Ujian Nasional dan masalah guru.

Wakil Ketua Komisi X Sutan Adil Hendra membacakan naskah kesimpulan yang ditandatangani bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan. Dalam kesimpulan tersebut, Komisi X DPR mengapresiasi langkah-langkah Kemendikbud agar terus meningkatkan pelaksanaan dan penyediaan sarana prasarana ujian nasional.

"Utamanya kesiapan infrastruktur jaringan internet dan kesiapan sumber

(eko), Foto: azka/hr



Sekjen DPR Tingkatkan Kerjasama dengan Garuda Indonesia

Dalam rangka meningkatkan kinerja anggota dewan, Sekretaris Jenderal DPR RI Winantuningtyastiti menandatangani perjanjian kerja sama penyediaan layanan sebelum penerbangan dengan PT Garuda Indonesia (persero) pada Jumat, (29/04) di Ruang Rapat Sekretariat Jenderal, Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta.

Ini adalah salah satu upaya dari Setjen DPR untuk meningkatkan pelayanan anggota dewan sehingga bisa meningkatkan kinerja. "Semoga dengan kerjasama ini bisa meningkatkan layanan dan kinerja anggota dewan," ujarnya.

Kerjasama ini dimaksudkan untuk memperkuat aspek keprotokolanan ketika anggota dewan melakukan kunjungan ke daerah. "Ini lebih terkait aspek keprotokolanan anggota dewan. Sehingga lebih ada kemudahan dan kelancaran ketika check in atau ketika menunggu pesawat di lounge. Nanti akan ada petugas bandara yang mendampingi," ujar Win, sapaan akrab Winantuningtyastiti.

Win menjelaskan bahwa kerjasama antara Setjen DPR dengan Garuda Indonesia sudah terjalin sejak satu tahun lalu, jadi kerjasama kali ini sifatnya lebih karena perluasan cakupan wilayah. "Kerjasama dengan Garuda sudah ada sejak 1 tahun lalu, tapi cuma ada di Bandara Soekarno Hatta dan Halim Perdana Kusuma, jadi ini adalah kelanjutan kerjasama yang diperluas.

"Perluasan itu adalah Bandara Kualanamu (Medan), Bandara Sepinggan (Balikpapan), Bandara Sultan Hasanuddin (Makassar), Bandara Ngurah Rai (Bali) dan Bandara Juanda (Surabaya). Jadi saat ini ada tujuh bandara," sambungnya.

Terkait kerjasama ini, Win mengaku senang karena ditengah dinamika politik dan ditengah persaingan bisnis penerbangan. "Alhamdulillah, kami senang hari ini bisa hadir dalam penandatanganan MoU dalam rangka penyediaan layanan sebelum



Sekjen DPR RI Winantuningtyastiti berjabat tangan dengan Dirut Pelayanan PT. Garuda Indonesia

penerbangan antara Setjen DPR dengan Garuda Indonesia,"

Dalam penandatanganan ini, Win berharap kerjasama ini tidak hanya terjadi di atas kertas saja, tetapi juga diikuti dengan profesionalitas para staf dari Garuda Indonesia ketika ada anggota dewan yang datang atau tiba ke bandara.

"Tadi saya sampaikan bahwa kerjasama ini tidak hanya diatas kertas, tapi seluruh staf di lapangan juga harus tahu di lokasi ketika ada anggota dewan di tujuh bandara tadi. Seperti *check in* itu harus dilayani dengan baik. Jangan sampai ada staf yang bertugas di lapangan tapi tidak tahu," jelasnya.

Selain itu, Direktur Pelayanan Garuda Indonesia, Nicodemus P. Lampe mengatakan terima kasih atas kepercayaan Setjen DPR kepada Garuda Indonesia sehingga bisa ikut berkontribusi dalam upaya meningkatkan kinerja dewan. "Puji syukur karena saat ini bisa tanda tangan MoU kerjasama pelayanan sebelum penerbangan. Atas nama Garuda Indonesia kami ucapkan terima kasih

atas kepercayaannya untuk melayani penerbangan anggota dewan melalui Garuda Indonesia," paparnya.

Ia menjelaskan dengan adanya kerja sama ini anggota dewan bisa mendapatkan pelayanan yang lebih, hal itu penting untuk mengimbangi agenda dewan yang cukup padat. "Kita ingin supaya anggota dewan lebih dapat menikmati layanannya. Karena sibuk sehingga butuh pelayanan yang baik. Sehingga kita bisa berkontribusi dalam meningkatkan kinerja dewan," ujar Nico.

Selain itu Nico juga menjelaskan bahwa Garuda Indonesia adalah salah satu dari tujuh maskapai penerbangan di dunia yang mendapat anugerah bintang lima. "Kita juga salah satu dari tujuh maskapai yang mendapat anugerah bintang lima. Mudah-mudahan ini adalah hal yang baik untuk mengangkat nama baik Indonesia,"

Dalam penandatanganan kerja sama ini, hadir pula oleh Deputi Bidang Administrasi Achmad Djuned dan Deputi Bidang Persidangan Damayanti beserta sejumlah jajaran. ■



Daryatmo Mardiyanto Pimpin Pansus RUU Wawasan Nusantara

Anggota Komisi VII DPR Daryatmo Mardiyanto terpilih menjadi Ketua Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang Wawasan Nusantara. Dikemukakan Daryatmo, RUU yang merupakan usul inisiatif Dewan Perwakilan Daerah (DPD), secara umum menggambarkan tentang pentingnya merawat, menjaga maupun menopang makna nusantara sebagai negara kesatuan.

"Saya kira ini menjadi penting, karena Indonesia merupakan negara kepulauan yang bercirikan nusantara. RUU yang diusulkan DPD ini akan kami dalam secara efektif di masa persidangan berikutnya," tegas politisi F-PDIP itu, sesaat setelah dilantik oleh Wakil Ketua DPR Fadli Zon di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (27/4).

Politisi daerah pemilihan Jawa Tengah II ini lebih lanjut memaparkan, Konsep Wawasan Nusantara yang dimaksud terinspirasi dari deklarasi Juanda yang mengatakan kepada dunia, bahwa laut Indonesia adalah termasuk laut sekitar, diantara dan di dalam kepulauan Indonesia menjadi satu kesatuan wilayah NKRI.

"Indonesia merupakan negara kepulauan diantara laut-laut yang menggambarkan bahwa dengan laut bukan suatu pembatas tetapi sebuah penghubung. Dari wilayah itu kita mengenal wilayah nusantara, yang mempunyai Zona-Zona Ekonomi (ZTE) eksklusif yang batasnya 200 KM dari pantai terdekat," ujar Daryatmo.

Selain itu, legislator ini berharap



Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon memberikan ucapan selamat kepada Pimpinan Pansus

dengan terbentuknya Pansus ini, akan mencari jalan agar RUU ini memperoleh posisi penempatan secara hierarki terhadap undang-undang lainnya. "Kita harus memposisikan bahwa RUU Wawasan Nusantara memperoleh hierarki dan posisi politik dan hukum yang cukup strategis, memayungi dari berbagai perundangan berikutnya yang dibuat maupun beberapa perundangan lainnya yang ada." ■

(Am), foto:jaka/hr

Komisi VII Pertanyakan Realisasi Program Listrik 35.000 MW

Komisi VII DPR RI menggelar RDP dengan Dirut PLN Sofyan Basir dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan, Selasa (26/4) di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta. Komisi VII mempertanyakan informasi terkini tentang neraca ketenagalistrikan dan infrastruktur distribusi, progres realisasi program listrik 35 ribu Mega Watt, serta upaya-upaya yang dilakukan agar pembangunan pembangkit dapat terealisasi sesuai dengan target yang dicanangkan.

"Apakah program listrik 35 ribu mega watt tidak terlalu muluk, sebab Dirut PLN pernah menyatakan ke DPR bahwa tahun 2019 semua akan beres. Tetapi ternyata selama satu tahun berjalan, 1 persen saja tidak sampai target," ujar anggota DPR Ramson Siagian.

Lebih lanjut Ramson menanyakan, potensi penyediaan listrik untuk negara ini, apakah sudah sesuai, walaupun tidak sesuai apa boleh buat karena terjadi perlambatan ekonomi. Sementara untuk

yang 7.000 mega watt juga baru 29 persen."Apakah tahun 2019 masalah ini bisa diselesaikan atau tidak?," tanya politisi F-Gerindra tersebut.

Sebagai informasi, dalam rangka peningkatan pemenuhan kebutuhan tenaga listrik secara adil dan merata serta mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerintah memandang perlu dilakukan percepatan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan termasuk pembangunan pembangkit 35 ribu MW dan jaringan transmisi sepanjang 46 ribu Km. Pembangunan ini mengutamakan penggunaan energi baru guna mendukung penurunan emisi gas rumah kaca.

Dalam rangka pelaksanaan pembangunan infrastruktur tersebut, pemerintah pusat memberikan tugas kepada PT. PLN dengan memberikan dukungan berupa penjaminan, percepatan perizinan dan non perizinan, penyediaan energi primer, tata ruang, penyediaan tanah, dan penyelesaian hambatan dan permasalahan yang dihadapi.



Anggota Komisi VII DPR Ramson Siagian

Dengan memperhatikan pertimbangan itulah, Presiden Joko Widodo menandatangani infrastruktur ketenagalistrikan pada tanggal 8 Januari 2016.

Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan (PIK) adalah kegiatan perencanaan, pengadaan dan pelaksanaan dalam rangka penyediaan infrastruktur ketenagalistrikan, yang meliputi segala hal yang berkaitan dengan transmisi tenaga listrik, distribusi tenaga listrik, gardu induk dan sarana pendukung lainnya. ■

(dep,mpl), foto :jaka/hr



Komisi X DPR RI Puji Destinasi Wisata di Lagoi Bintang

Ketua Tim Kunjungan Spesifik Komisi X DPR RI ke Provinsi Kepulauan Riau Sutan Adil Hendra puji destinasi wisata di Lagoi, Kabupaten Bintang, Provinsi Kepulauan Riau. Menurutnya destinasi wisata di Lagoi Bintang sangat luar biasa dengan keindahan alam yang dimiliki dan penataan yang begitu baik.

"Ini merupakan hal yang luar biasa, karena

umumnya kesulitan pengembangan kawasan pariwisata dikarenakan padatnya penduduk. Tapi di Bintang dengan penduduk yang tidak terlalu ramai, destinasi wisata dapat ditata dengan rapi," kata Sutan di sela-sela kunjungan ke beberapa *resort* yang menjadi primadona dan tujuan wisatawan domestik dan wisatawan mancanegara di Lagoi, Bintang, Kepulauan Riau, Jumat (22/04).

Dalam kesempatan tersebut, Sutan yang juga Wakil Ketua Komisi X ini mengingatkan bahwa ada satu catatan penting yaitu mengenai transportasi yang masih sulit untuk menjangkau pulau Bintang. "Hal-hal inilah yang perlu pembenahan, dan kami mendorong pemerintah daerah untuk dapat menyampaikan kendala yang ada dalam kunjungan kerja komisi X ini," tegasnya.

Untuk meningkatkan tingkat kunjungan wisatawan yang lebih besar ke Bintang, menurutnya perbaikan infrastruktur terutama akses transportasi mutlak gencar dilakukan. "Di manapun, akses, sekali akses penting dalam menarik wisatawan. Kawasan boleh indah, tapi kalau minim akses, akan sulit mendatangkan lebih banyak wisman, sebab orang membutuhkan kemudahan berpergian," mantapnya.

Berbicara mengenai dunia pariwisata, tegasnya, ada tiga hal yang menjadi kunci



Tim Kunjungan Spesifik Komisi X DPR RI ke Provinsi Kepulauan Riau

utama. Pertama destinasi wisata, kedua infrastruktur, dan ketiga yaitu industri pariwisata itu sendiri yang dalam hal ini adalah sumber daya manusianya. "Sumber daya manusia ini, bagaimana kita harapkan adanya pemandu wisata yang ramah, pelayanan yang juga ramah dan mencerminkan etika wilayah setempat," tukas politisi dari Partai Gerindra ini.

Ketika ditanya mengenai regulasi kawasan wisata pantai yang diatur pemerintah pusat yaitu berjarak 100 meter dari bibir pantai, ia menegaskan bahwa regulasi tersebut merupakan regulasi dari Kementerian Lingkungan Hidup yang tentu saja memiliki tujuan yang lebih besar, yaitu untuk menjaga keselamatan, dan tentu saja untuk menjaga ekosistem yang ada. Namun aturan ini dapat dikomunikasikan lagi.

"Untuk itulah diperlukan *input* yang komprehensif antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat, untuk dapat dikaji kembali tergantung situasi dan kondisi masing-masing daerah. Bisa saja kalau di Bali 100 meter, tapi di Bintang cukup 75 meter misalnya. Ini bisa dikomunikasikan kembali," paparnya.

Lebih lanjut, Sutan Adil Hendra menjelaskan bahwa kunjungan spesifik ini dilakukan mengingat pariwisata merupakan salah satu bidang yang menjadi fokus komisi X DPR RI. Ditambah

lagi, Kementerian Pariwisata merupakan salah satu mitra kerja dari komisi X DPR RI, sehingga laporan dari hasil kunjungan ini akan diteruskan kepada Kementerian Pariwisata.

Sementara itu, Wakil Bupati Bintang Dalmasri Syam yang mendampingi kunjungan ini mengucapkan terima kasih atas kesediaan Tim Komisi X DPR RI datang dan meninjau destinasi wisata di Bintang. "Apalagi dikatakan bahwa Bintang bisa menjadi Bali kedua di Indonesia,

hal ini tentu saja sangat membanggakan," katanya.

Namun ia berharap ini dapat didukung oleh pemerintah, mengingat masih ada catatan-catatan dalam peninjauan ini. Ia juga mengharapkan dukungan dari Komisi X DPR RI dalam meningkatkan dan mengembangkan kawasan Bintang.

Sedangkan, Bupati Bintang Apri Sujadi mengatakan dengan adanya kunjungan Komisi X DPR RI ini, diharapkan dapat membantu dan bekerjasama demi kemajuan Kabupaten Bintang yang gemilang dari berbagai bidang. ■

(sc), foto : sutiati/hr.

DPR telah meyetujui penyesuaian besaran penghasilan tidak kena pajak (PTKP) yang telah dikonsultasikan dengan pemerintah dan mulai berlaku untuk tahun pajak 2016. Besaran wajib pajak orang pribadi yang semula Rp36.000.000 per tahun dinaikkan menjadi Rp54.000.000 per tahun.

Ketua DPR RI Ade Komarudin menyampaikan hal tersebut dalam pidato Penutupan Masa Sidang IV, Jumat (29/4). "Dalam rangka optimalisasi penerimaan sektor perpajakan, DPR meminta pemerintah mendorong upaya ekstensifikasi pajak sehingga menciptakan keadilan bagi



DPR Minta Kemenag Negosiasi Garuda Indonesia

Komisi VIII meminta kepada Kementerian Agama untuk melakukan negosiasi harga dengan PT. Garuda Indonesia, agar biaya penerbangan haji dapat dikurangi dari harga yang ditentukan Rp. 25 Juta, menjadi Rp. 21 juta.

Anggota Komisi VIII Khatibul Umam Wiranu mengatakan PT. Garuda Indonesia sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) seharusnya memiliki jiwa nasionalisme dengan tidak memaksimalkan keuntungan dalam melaksanakan pelayanan penerbangan para jamaah haji



Anggota Komisi VIII DPR Khatibul Umam Wiranu

Indonesia.

"Saya minta kepada Kementerian Agama untuk melakukan negosiasi dengan PT. Garuda Indonesia, jangan hanya mematok harga," katanya, dalam Rapat Panitia Kerja Komisi VIII dengan Dirjen Penyelenggara Haji dan Umrah, membahas Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2016, di Gedung DPR, Kamis (28/4).

Politisi Partai Demokrat ini mengutip, temuan atas audit BPK tahun 2015, bahwa PT. Garuda Indonesia memaksimalkan keuntungan dalam pelayanan penerbangan jamaah haji, untuk menutupi sejumlah kerugian penerbangan domestik yang dalam kurun waktu satu tahun itu tidak mengalami keuntungan.

"Dia (Garuda Indonesia) melakukan tindakan yang tidak adil terhadap jamaah haji setiap tahun, dengan menutup ketidakuntungan Garuda Indonesia diluar bulan haji," ungkapnya.

Selanjutnya kata dia, faktanya ini adalah monopoli, tetapi semonopoli apapun yang namanya Garuda Indonesia harus punya jiwa nasionalisme. Ini adalah pemberangkatan atas nama bangsa Indonesia, sebagai BUMN dia tidak boleh memaksimalkan keuntungan justru mestinya memberikan bantuan kepada jamaah.

Karena itu, Komisi VIII menawar biaya pelayanan perjalanan penerbangan jangan dipatok dengan harga Rp.25 juta. Menurutnya dengan Rp. 21 juta saja Garuda Indonesia sudah mendapatkan keuntungan 5%, maka dikalikan 70 ribu jamaah maka perkiraan keuntungan yang akan diperolehnya sekitar 80 milyar, sudah cukup keuntungan itu.

"Supaya tidak bertele-tele maka Kemenag diminta memaksimalkan perundingan tawar menawar dengan Garuda pada posisi yang *fix price*, jangan lagi berkelit maka akan lama pembahasannya. Jangan karena manajemen yang belum baik, ditutupi dengan cara mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya dari pemberangkatan jamaah haji," tegasnya.

Patut diketahui pada pertemuan rapat sebelumnya, Komisi VIII dengan Dirut Garuda Indonesia yang bersedia menurunkan Rp 4,6 Milyar, dari komponen avtur. Itu pun hanya dari embarkasi Solo dan embarkasi Jakarta.

Padahal, Umam menambahkan, jika hitungan harga avtur sudah lebih murah. hal ini menjadi mahal karena Kemenag tidak melakukan negosiasi langsung dengan PT. Pertamina.

"Yang melakukan negosiasi PT. Garuda Indonesia, coba Kementerian Agama melakukan negosiasi langsung dengan PT. Pertamina melalui perantara Garuda pasti menghasilkan harga avtur yang lebih murah. Sehingga sewa pesawat Garuda avturnya beli langsung dari Pertamina. Itu akan memurahkan ongkos perjalanan udara jamaah," imbuhnya. ■

DPR Setujui Besaran PTKP

wajib pajak yang patuh membayar kewajibannya serta upaya intensifikasi terhadap wajib pajak besar, badan, dan orang pribadi yang belum patuh."

DPR juga meminta pemerintah untuk melakukan pengawasan yang lebih intensif terhadap aparat pajak dan beacukai dalam melaksanakan tugas di lapangan. Selain itu Ketua DPR juga meminta kepada pemerintah untuk memberikan perhatian khusus terhadap inflasi yang diakibatkan oleh *volatile foods* dalam upaya menjaga daya beli masyarakat dan meminta kepada pemerintah provinsi agar mengalokasikan anggaran secara khusus untuk menjaga tingkat inflasi. ■



Ketua DPR RI Ade Komarudin

(rief, mih), foto: jayadi/hr

(as), Foto : kresno/hr



Cetak Sawah Baru Harus Perhatikan Aspek Teknis

Anggota Komisi IV DPR Muhammad Nasyit Umar mengingatkan Pemerintah, agar dalam menjalankan program cetak sawah, selalu memperhatikan aspek aturan teknis. Ia menegaskan, program cetak sawah yang menargetkan hingga 200 ribu hektar pada tahun 2016 itu jangan sampai sia-sia.

Demikian dikatakannya di sela-sela peninjauan lokasi cetak sawah di Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan, beberapa waktu yang lalu. Kunjungan spesifik yang dipimpin Ketua Komisi IV DPR RI Edhy Prabowo (F-Gerindra) itu, terfokus pada program cetak sawah di Kabupaten Pinrang, yang mendapat jatah pencetakan sawah mencapai 1000 hektar.

"Komisi IV melakukan peninjauan ini, agar pencetakan sawah sesuai dengan aturan teknis. Harus ada Calon Petani Calon Lokasi (CPCL) dulu, kemudian setelah itu harus diadakan pengukuran, dan dilanjutkan dengan pendesainan sawah," kata Nasyit.

Dengan dasar itulah, lanjut politisi F-PD itu, proses pencetakan dapat dilakukan. Menurutnya, jika proses itu tidak dilakukan sesuai aturan teknisnya, dapat membahayakan keuangan negara.

"Kalau tanpa proses itu, akan berbahaya. Karena akan berbeda antara luasan yang dibayar Pemerintah, dengan luasan yang di lapangan. Nah kemudian desain itu juga harus dipenuhi sesuai



Komisi IV DPR meninjau pencetakan lahan sawah baru di Kabupaten Pinrang

dengan tata cara pelaksanaan pembuatan sawah baru," ingat Nasyit.

Saat peninjauan ke lokasi persawahan, Nasyit mencermati ada beberapa kejanggalan dalam pencetakan sawah ini, yakni tak adanya desain sawah dan pematang sawah yang belum terbentuk dengan baik. Belum lagi masih adanya kayu pepohonan bekas penebangan di sekitar lokasi,

"Dikhawatirkan ini akan mengurangi hasil panen, karena air tidak akan mengalir

dengan baik dan pematang yang belum terbentuk dengan baik," kritisi Nasyit.

Belum lagi, politisi asal dapil Sulsel ini khawatir, jika tak ada sumber air dengan lokasi persawahan, berarti sawah akan menjadi sawah tadah hujan, yang mengakibatkan sawah hanya dapat dipanen sekali dalam setahun.

"Kalau Pemerintah ingin menargetkan 1 juta hektar selama 5 tahun ini, harus ditata dan dilaksanakan sesuai dengan aturan teknis. Jika tidak, anggaran yang sudah dikururkan ini akan sia-sia," pesan Nasyit.

Sementara itu Anggota Komisi IV DPR OO Sutisna (F-Gerindra) menilai, pematang sawah yang belum terbentuk, dapat dilakukan bersamaan penanaman padi. Sehingga tak mesti dari awal harus langsung terbentuk pematang sawah.

"Jika musim kering pun, dan tidak ada suplai air, bisa ditanami padi gogo. Masih bisa dikembangkan seperti itu," imbuh politisi asal dapil Jawa Barat itu.

Wakil Bupati Pinrang, Darwis Bustami berharap, dengan program pencetakan sawah baru ini, pihaknya optimis, hal ini dapat meningkatkan produktifitas padi di Sulawesi Selatan, khususnya Pinrang. ■

(sf), foto : sofyani/hr



Anggota Komisi VIII DPR Desy Ratnasari

Komisi VIII Kunjungi P2TP2A Papua Barat

perempuan dan anak.

Komisi VIII menyangkan angka kekerasan terhadap perempuan masih cukup tinggi di Papua Barat. Data dari kantor P2TP2A Manokwari, angka kekerasan terhadap perempuan pada tahun 2015 mencapai 280 kasus.

Sementara terhadap anak relatif kecil hanya 15 kasus.

Hadir dalam kunjungan kerja Komisi VIII DPR ke Manokwari, Senin (2/5), kali ini adalah Achmad Mustaqim, Anim Mahrus, Desy Ratnasari, dan Endang Maria Astuti. Kantor P2TP2A di Manokwari belum memiliki rumah aman. Korban kekerasan sementara ditampung di rumah

dinas atau rumah pegawai P2TP2A.

Penyelesaian kasus kekerasan di Papua Barat bisa dilakukan lewat jalur kekeluargaan atau jalur adat. Petugas P2TP2A tetap mendampingi korban selama proses penyelesaian secara kekeluargaan atau adat berlangsung. Kepolisian setempat juga ikut memfasilitasi penyelesaian kasus, bila ingin diselesaikan secara hukum.

Pada kesempatan tersebut, Komisi VIII juga menyalurkan bantuan secara simbolis dari Kementerian PP dan PA berupa dana dekonsentrasi sebesar Rp1 miliar yang diserahkan Anggota Komisi VIII Desy Ratnasari kepada Pemprov Papua Barat. ■

(mh), foto : huseini/hr

Komisi VIII DPR RI kunjungi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Papua Barat di Manokwari untuk melihat dari dekat angka kasus kekerasan terhadap



DPR Apresiasi Pemerintah Terkait Pembebasan Visa 169 Negara

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengapresiasi kebijakan pemerintah tentang pembebasan visa bagi warga negara dari 169 negara dan pembentukan Tim Pengawasan Orang Asing.

"Dengan pembebasan visa tersebut, semoga dapat meningkatkan jumlah wisatawan mancanegara untuk berkunjung ke Indonesia," kata Ade dalam pidato penutupan masa sidang IV, Sidang Paripurna DPR, Jakarta, Jum'at (29/4).

Selanjutnya, terkait dibentuknya Tim Pengawas Orang Asing, ujar Ade, diharapkan dapat mencegah dan menindak orang asing pelanggar aturan imigrasi, "Selain itu, hal ini juga harus diikuti dengan



Suasana Sidang Paripurna DPR RI

Protokol Pengamanan terhadap NKRI," jelasnya.

Sementara itu, mengenai beberapa WNI yang disandera kelompok bersenjata

Abu Sayyaf di Filipina, ungkap Ade, DPR mendesak pemerintah untuk segera mengambil sikap konkret dalam upaya pembebasan sandera.

"Selain itu, DPR mendorong pemerintah untuk menginisiasi perjanjian multilateral dengan negara-negara Asean dalam rangka kerjasama pengamanan jalur perairan laut sebagai jalur lintas perdagangan," tandasnya.

"DPR juga mendorong pemerintah segera membuat perjanjian bilateral dengan Filipina, agar dapat dilakukan patroli secara bersama pada jalur utama pelayaran agar keamanan dijalur tersebut terjamin," tambahnya. ■

(rief), foto: jayadi/hr

Pembangunan Infrastruktur dan Konektifitas Daerah Kunci Pertumbuhan Ekonomi

Dalam rangkaian Pertemuan Asia-Europe Parliamentary Partnership Meeting (ASEP) ke-9 di Mongolia 22 April 2016 lalu, Delegasi DPR RI turut berpartisipasi aktif dalam memberikan kontribusi bagi tercapainya kesepakatan bersama antara Parlemen se-Asia dan Eropa. Pertemuan ASEP diselenggarakan setiap 2 (dua) tahun sekali untuk membahas isu-isu internasional, regional maupun kasus-kasus tertentu yang memiliki muatan politis serta berdampak besar terhadap stabilitas keamanan dan perdamaian global.

Wakil Ketua BKSAP Tantowi Yahya secara khusus menyampaikan intervensi pada Panel Diskusi I dengan topik "Connectivity and Effective Multilateralism" yang menekankan bahwa konektifitas antara kawasan Asia dan Eropa merupakan elemen penting dalam upaya untuk mengurangi kesenjangan dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Untuk mendukung konektifitas, dibutuhkan pembangunan sarana infrastruktur yang memadai, baik di darat maupun di perairan. Dalam hal ini, Indonesia sebagai negara kepulauan berkomitmen untuk memperkuat keamanan maritim dan

membangun infrastruktur maritim. "Daerah-daerah terpencil harus terhubung dengan pusat perekonomian untuk mengakselerasi proses pembangunan dan mengupayakan pemerataan kesejahteraan. Setiap elemen



Delegasi Parlemen Indonesia di Sidang ASEP ke-9 di Mongolia

masyarakat harus dapat memperoleh kesempatan yang sama dalam era globalisasi. Oleh karena itu, keterlibatan sektor Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dalam *global supply chain* harus diupayakan," tegasnya.

Konektifitas antarkawasan juga merupakan salah satu fokus pembahasan dalam Asia Europe Meeting (ASEM). ASEM sendiri merupakan forum antar pemerintah yang dalam mekanisme kerjanya didukung

oleh forum non-pemerintah yang terdiri dari Asia-Europe Business Forum (AEBF), Asia-Europe People's Forum (AEPF), dan ASEP. Hingga saat ini, keanggotaan ASEM terus berkembang hingga mencakup 53 mitra yang terdiri dari 21 negara Asia, 30 negara Eropa, Sekretariat ASEAN, dan Uni Eropa.

Pertemuan ke-9 ASEP dihadiri oleh perwakilan parlemen dari 32 negara Asia-Eropa dengan tujuan untuk membangun kemitraan dan mendorong kemajuan kerja sama Asia-Eropa, memperkuat dialog dan saling pengertian antara kedua kawasan. Pada dasarnya, sifat kerja sama regional yang dirumuskan baik melalui ASEM dan ASEP adalah informal dan tidak mengikat. Kerja sama dalam ASEP difokuskan pada tiga pilar yaitu politik, ekonomi, dan sosial-budaya. Keanggotaan ASEP merepresentasikan lebih dari separuh penduduk dunia, 57% GDP dunia dan 66% volume perdagangan dunia.

Mempertimbangkan peran strategis kerja sama antar kawasan dalam menghadapi tantangan globalisasi, DPR RI senantiasa berkomitmen untuk mendorong agar kerja sama Asia-Eropa dapat menghasilkan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat. ■

(BKSAP/mp), foto: dok.bksap/hr



Komisi VI dan Mendag Bahas Realisasi Anggaran Triwulan I 2016

Komisi VI DPR RI menggelar rapat kerja dengan Kementerian Perdagangan membahas realisasi anggaran, kendala mitra kerja, serta pelaksanaan program dari anggaran yang telah dikururkan, Selasa (26/4) petang.

Dalam acara yang dipimpin Ketua Komisi VI A. Hafisz Tohir dipertanyakan



Ketua Komisi VI DPR A Hafisz Tohir

mengenai realisasi anggaran Kementerian Perdagangan pada triwulan

I tahun anggaran 2016.

Menteri Perdagangan Thomas Lembong menjelaskan, realisasi anggaran pusat dan dana dekonsentrasi Kementerian Perdagangan sampai dengan tanggal 24 April 2016 sebesar 17,32 persen, dengan total nominal realisasi sebesar Rp 407.235.277.730.

"Apabila diperhitungkan anggaran yang dialokasikan di daerah dalam bentuk dana tugas pembantuan, maka realisasi anggaran Kemendag baru mencapai 10,40 persen," papar Thomas.

Komisi VI melalui Pimpinan Sidang juga mempertanyakan kendala yang dihadapi oleh Kemendag. "Kendala-kendala apa saja yang dihadapi Kementerian Perdagangan dan bagaimana solusi penyelesaiannya," ujar Hafisz.

Menanggapi hal itu Mendag menjawab, kendala rendahnya penyerapan anggaran disebabkan oleh hambatan beberapa

kegiatan masih dalam poses lelang. Selain itu realisasi anggaran pada program pengembangan perdagangan dalam negeri baru mencapai Rp. 107,48 miliar (5,21%) dari total pagu sebesar Rp. 2,06 trilyun.

Thomas menjelaskan, rendahnya penyerapan tersebut dikarenakan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) petikan untuk dana tugas pembantuan sebesar Rp. 1,46 trilyun untuk dana revitalisasi 168 pasar rakyat masih dalam proses di Ditjen Anggaran Kementerian Keuangan.

Untuk mengatasi masalah tersebut dia menjelaskan, Kemendag telah melakukan koordinasi secara intensif dengan Ditjen Anggaran Kementerian Keuangan dan BAPPENAS terkait proses penerbitan DIPA baik melalui surat maupun rapat-rapat teknis.

Sedangkan terkait dengan program dari pelaksanaan anggaran tahun 2016 yang ditanyakan Komisi VI DPR, Mendag Thomas Lembong menjabarkan, program dukungan manajemen untuk operasional pegawai serta penguatan lembaga perlindungan konsumen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya. ■

(eko.rmp), foto: iaka/hr.

Mayoritas Pekerja Belum Terlatih dan Terdidik

Mayoritas pekerja Indonesia ternyata belum terdidik dan terlatih, sehingga menurunkan daya tawarnya di hadapan para pengusaha atau pemberi kerja. Pemerintah harus memberi perhatian atas kenyataan ini, terutama bagi pekerja Indonesia di luar negeri.

Demikian terungkap dalam diskusi Dialektika Demokrasi yang membincang soal buruh di Media Center DPR RI, Kamis (28/4). Diskusi ini sekaligus sebagai refleksi jelang hari buruh internasional pada awal Mei ini. Hadir sebagai pembicara

Anggota Komisi VI Rieke Diah Pitaloka, Eko Darwanto (Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan), dan Siti Zuhro (pengamat politik LIPI).

Menurut Rieke, upah pekerja di Indonesia umumnya masih rendah dan bahkan belum menyentuh rasa keadilan. Selalu ada kesenjangan upah di lingkungan kerja yang dirasakan para pekerja. Yang paling ironis ketika para pekerja di BUMN ternyata tak kalah kecilnya dalam menerima upah seperti para pekerja di sektor swasta. "Mestinya BUMN harus menjadi garda terdepan dalam memperlakukan aturan ketenagakerjaan. Bahkan, pekerja

outsourcing juga masih banyak di BUMN," kata Anggota F-PDI Perjuangan ini.

Saat rapat dengan Kementerian Perindustrian, Rieke juga mengaku sudah menyerukan pemerintah agar melindungi para pekerja BUMN di sektor industri. Pada bagian lain, Rieke juga mengungkapkan, pada peringatan hari buruh, ada banyak isu yang akan disuarakan. Persoalan upah masih menjadi isu utama. Dahulu, di zaman Orde Lama, peringatan hari buruh diperingati oleh Bung Karno di istana. Kini, malah buruh yang mendatangi istana.

Sementara itu, Eko Darwanto



Legislator Apresiasi Kinerja Tiga Institusi Negara Bebaskan 10 WNI

Anggota Komisi I DPR RI, Darizal Basir, mengapresiasi keberhasilan tiga institusi negara, Kementerian Luar Negeri, Badan Intelijen Negara (BIN) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam membebaskan 10 WNI yang disandera oleh kelompok Abu Sayyaf sejak tanggal 26 Maret 2016. Selain itu menurutnya, pembebasan ini, merupakan hasil dari koordinasi dan kerjasama banyak pihak, baik Indonesia maupun Filipina, *Government* ataupun *non-Government*.

"Komisi I meletakkan perlindungan WNI di luar negeri sebagai salah satu prioritas program kerja Kemenlu. Dan saya melihat dalam kasus ini, Kemenlu telah bekerja optimal dengan cara terus menerus secara intensif melakukan diplomasi dan negosiasi dengan seluruh *stakeholders*," ujar Darizal, menyampaikan rilisnya kepada Parlemen, Senin (2/5).

Anggota Dewan dari dapil Sumatera Barat ini menilai, keberhasilan pembebasan WNI yang disandera merupakan hasil upaya yang terus menerus yang dilakukan secara intensif oleh tiga institusi pemerintah. Kemenlu berdiplomasi, BIN menelusuri dan mencari data penting, dan TNI memberi efek gentar kepada penyandera.

Politisi dari Fraksi Partai Demokrat ini menerangkan, Intelijen Indonesia berperan sangat penting, karena informasi yang disampaikan sangat bermanfaat bagi Kemenlu. Menurutnya, petunjuk tersebut sebagai amunisi dalam berdiplomasi.

Sementara TNI memberikan efek gamang atau gentar bagi penyandera WNI. Selain itu, kesiagaan TNI, bisa semakin memperkuat peran-peran diplomasi yang dilaksanakan oleh Kemenlu. "Mereka tentu akan berpikir ulang kalau hendak mengeksekusi para sandera WNI," jelas Darizal.

Saat ditanya mengapa Pemerintah saat ini tidak langsung mengerahkan pasukan TNI seperti ketika terjadi penyanderaan WNI di Somalia, Darizal menjelaskan bahwa antara Somalia dan Filipina merupakan dua negara dengan kondisi yang berbeda. "Somalia saat itu dapat dikelompokkan sebagai *failed state* atau negara gagal. Administrasi dan pemerintahannya tidak mampu mengendalikan keamanan internal sehingga tidak bisa diandalkan," paparnya.

Namun demikian, lanjut Anggota



Anggota Komisi I DPR RI Darizal Basir

Komisi yang membidangi luar negeri, intelijen dan pertahanan ini mengatakan, Pemerintah Indonesia saat itu tidak langsung bertindak gegabah yang bisa menyinggung kedaulatan negara lain. "Walau dianggap negara gagal, kita tetap menghargai kedaulatan Somalia dan Hukum Internasional sehingga komunikasi dengan Kemlu Somalia dan Sekjen PBB juga dilakukan intensif," katanya mengisahkan.

Sedangkan untuk kasus Filipina, situasinya berbeda. Filipina bukan *failed state* dan negara tersebut tidak mengizinkan adanya opsi militer oleh Indonesia. "Sebagai sesama negara ASEAN yang sangat menjunjung tinggi kedaulatan masing-masing negara, Indonesia menghormati keputusan Filipina tersebut," terang Darizal.

Para WNI tersebut adalah anak buah kapal (ABK) dari kapal Brahma 12 yang menarik kapal tongkang Anand 12 yang berisi 7.000 ton batubara. Saat melintasi perairan Filipina, kapal mereka disergap oleh kelompok bersenjata yang berafiliasi dengan Abu Sayyaf. Penyandera kemudian meminta tebusan sebesar 50 juta peso atau setara dengan 1 juta dolar AS.

Darizal mengingatkan bahwa setelah pembebasan 10 WNI ini, masih ada empat WNI lain yang juga harus diperhatikan nasibnya dan diselamatkan jiwanya. Keempat WNI tersebut saat ini disandera oleh kelompok yang juga berafiliasi dengan Abu Sayyaf. Mereka adalah ABK kapal Henri yang menarik kapal tongkang Christi dan kemudian disergap pada tanggal 15 April 2016. ■

mengatakan, masih ada disharmoni antara pekerja dan pengusaha. Disharmoni itu lagi-lagi soal upah. Hal ini diakui pula oleh pengamat politik Siti Zuhro. Ada pola relasi yang perlu dirubah antara pekerja dan pengusaha. Keduanya harus saling memberdayakan. Dan diakui, pemerintah jauh lebih dekat kepada pengusaha daripada kepada buruh. "Fairness mesti ditegakkan dalam pola relasi ini," ucap wiwi-sapaan akrab Siti Zuhro. ■



(mp). Foto: Mastur/hr

Anggota Komisi VI DPR Rieke Diah Pitaloka

(eko) foto : Andri/hr



Komisi VIII Akan Jadikan Program BPBD Bali Contoh Nasional

Komisi VIII DPR RI dalam kunjungannya ke BPBD Provinsi Bali, mengapresiasi program-program yang disampaikan Kepala BPBD Provinsi Bali Dewa Made Indra dan akan menjadikan program BPBD Bali sebagai referensi program nasional dalam penanggulangan bencana yang nantinya dapat diaplikasikan di seluruh Indonesia.

Ketua Komisi VIII DPR RI Saleh Partaonan Daulay mengatakan program yang di kembangkan BPBD Prov. Bali tanggap penanggulangan bencana yang dilakukan pemerintah provinsi Bali dalam hal ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bali, mulai dari regulasi, pusdalops, pelatihan kesiapsiagaan bencana, pemantau Tsunami Indonesia, Tsunami Warming System (Ina-TEWS), Tempat Evakuasi Sementara (TES) Tsunami program kedaruratan bencana termasuk pemberian sertifikasi kesiapsiagaan bencana kepada Hotel yang notabene banyak di bangun di pinggir pantai, ini harus di contoh oleh provinsi yang ada di Indonesia.

Program-program tersebut kata Saleh Partaonan Daulay sangat bagus dikerjakan oleh pemerintah provinsi Bali. Sehingga hal tersebut perlu dijadikan contoh oleh provinsi lain di Indonesia. Komisi VIII DPR RI akan menjadikan program BPBD Bali sebagai referensi yang nantinya dapat di aplikasikan dan direalisasikan di daerah lain..

"Program-program BPBD Bali sangat bagus, dan saya akan jadikan referensi sehingga hal ini juga bisa diterapkan dan diaplikasikan di daerah lain di Indonesia," tegasnya.

Lebih lanjut Saleh Partaonan Daulay mengatakan program penanggulangan bencana di daerah, selain harus ditunjang dengan APBD juga harus dibantu dengan APBN, karena tanpa itu, pelaksanaannya tidak akan maksimal.

"Kemampuan APBD masing-masing daerah ini berbeda-beda. Sehingga tidak bisa mengalokasikan anggaran yang cukup besar untuk program kegiatan yang

sifatnya tidak rutin s e p e r t i penanggulangan bencana ini. Padahal potensi bencana pada musim penghujan ini cukup tinggi," kata Ketua Komisi VIII DPR RI Saleh Partaonan Daulay.

"Artinya, anggaran untuk kegiatan seperti p r o g r a m penanggulangan bencana, tidak bisa maksimal," ujarnya. Ia mengatakan, solusinya adalah dengan menambah kemampuan fiskal daerah menggunakan APBN.

"Ini sangat dimungkinkan karena sesuai UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penanggulangan bencana adalah urusan pusat yang kewenangannya diserahkan pada daerah, yang seharusnya juga diikuti dengan pengalokasian anggaran melalui sistem desentralisasi.

Istilahnya, *money follow function*, "tambahnya.

Sementara itu Kepala BPBD Bali Dewa Putu Indra mengatakan, semua elemen masyarakat harus tanggap bencana terlebih Bali merupakan salah satu destinasi wisata yang digemari dunia. Dijelaskannya, saat ini untukantisipasi bencana tsunami, telah disediakan sembilan sirine tsunami ditempatkan di objek-objek pariwisata seperti Sanur, Kuta, dan Tanah Lot.

Lebih lanjut dia mengatakan pihaknya juga rutin mengetes semua peralatan peringatan bencana, memberikan pelatihan ketanggap darurat dan sosialisasi penanggulangan bencana serta membangun tempat evakuasi sementara yang telah terealisasi di Desa Suwung Denpasar.

Walupun kita sudah mengantisipasi dengan baik, diakui pihaknya masih



Ketua Komisi VIII DPR RI Saleh Partaonan Daulay saat meninjau logistik BPBD Bali

mendapati beberapa permasalahan terutama ketika menghadapi bencana tahunan seperti kekeringan dan tanah longsor. Dengan adanya kunjungan dari Komisi VIII DPR RI ini nantinya dapat memfasilitasi kekurangan BPBD Bali meliputi mobil tangki air, alat berat, damkar dan lainnya. ■

(man), foto: andri/hr

Jika seorang oknum aparat kepolisian terkena masalah hukum, terlebih lagi terlibat kasus narkoba itu harus dijatuhi hukuman lebih berat. Hal tersebut diungkapkan anggota DPR RI, Edy Kusuma Wijaya, usai sidang paripurna DPR RI, Jumat (29/4).

"Jika seorang aparat penegak hukum seperti polisi terkena kasus hukum, apalagi kasus narkoba seperti yang tengah menimpa oknum Kasat Narkoba di Medan, maka menurut saya harus dihukum lebih berat, dan seberat-beratnya," ujar Edy.

Edy, yang juga seorang purnawirawan polisi ini melanjutkan bahwa sejatinya seorang polisi yang merupakan aparat penegak hukum menjadi contoh atau teladan bagi masyarakat lain.



Legislatur Fasilitasi Kerjasama Unja Dengan Selandia Baru

Hari Pendidikan Nasional yang diperingati pada 2 Mei setiap tahunnya, biasanya dirayakan berbagai kalangan dengan upacara atau seremonial. Namun hal berbeda dilakukan oleh Wakil Ketua Komisi X DPR RI Sutan Adil Hendra, yang menjadi fasilitator pembukaan kerjasama antara Universitas Jambi dengan Selandia Baru dalam hal pendidikan.

Kerjasama itu dibuktikan dengan kunjungan *Liaison Officer* (LO) atase pendidikan Kedutaan Besar Selandia Baru, yakni Brook W Ross dan Diana Devi ke Universitas Jambi, Jumat (29/4) lalu. Sutan memastikan, kunjungan itu untuk membuka peluang kerjasama pendidikan di perguruan tinggi dalam bentuk penelitian, peningkatan kapasitas dosen maupun peluang beasiswa.

"Kehadiran LO ini berfungsi sebagai



Wakil Ketua Komisi X DPR RI Sutan Adil Hendra

penghubung kita dengan pemerintah dan universitas di Selandia Baru di sana sebagai kemitraan. Jadi kunjungan ini dalam menjajaki peluang kerjasama berbagai bidang beserta industri turunannya antara Jambi dan Selandia Baru," kata Sutan, dalam rilis yang diterima Parlemen, Senin (2/5).

Politisi F-Gerindra itu menambahkan,

kunjungan itu juga bisa dikatakan sebagai pintu masuk kerjasama yang lebih luas dalam hal membangun pendidikan, industri peternakan dan pariwisata melalui kerjasama antara Indonesia dengan negara yang dikenal dengan sebutan Negeri Kiwi itu.

"Di Selandia Baru, telah terbentuk *mindset* bahwa industri harus berlandaskan riset, sehingga ketika bicara investasi, mereka sangat melihat kesiapan sumber daya suatu daerah, mendukung atau

tidak untuk kerja sama. Maka mereka datang ke Universitas Jambi untuk melihat daya dukung kampus terhadap industri, selain program pengembangan kampus UNJA sendiri," jelas Sutan.

Politisi asal dapil Jambi ini menyatakan dukungannya terhadap kerjasama ini, dan akan memperjuangkannya juga dari sisi anggaran melalui APBN. ■

(sf), foto: ake/hr

Polisi Terkena Kasus Hukum Harus Dihukum Lebih Berat



Anggota DPR RI PAW Edy Kusuma Wijaya

Sehingga seharusnya mampu memberikan perilaku yang terbaik, bukan malah sebaliknya.

Pada kesempatan itu Politisi dari Fraksi

PDI Perjuangan yang baru saja dilantik oleh Ketua MA, Hatta Ali lewat Keppres No. 33/P tahun 2016 tanggal 18 maret 2016 ini, menceritakan ikhwal pelantikannya sebagai anggota DPR RI yang baru bisa dilangsungkan hari ini.

"Di Dapil saya tersedia dua kursi, sementara perolehan suara saya tertinggi ke tiga. Namun caleg yang memperoleh suara tertinggi pertama terkena masalah hukum, kasus Pak Wawan (korupsi alat kesehatan di Banten-red), maka secara otomatis saya sebagai tertinggi ketiga sejatinya langsung menggantikannya. Namun ternyata tak semudah itu, terlebih dahulu saya harus menunggu proses hukum yang bersangkutan baru kemudian dilanjutkan dengan proses politik. Dan Alhamdulillah

hari ini saya resmi dilantik menjadi anggota DPR RI mewakili dapil saya Banten," paparnya.

Dengan latar belakang profesinya terdahulu sebagai seorang polisi dengan pangkat terakhir Irjen, Edy sejatinya ingin ditempatkan di Komisi III yang membidangi masalah hukum. Namun sebagai petugas partai ia mengaku siap ditempatkan di komisi dan bidang apapun.

"Kalau sesuai dengan *background* saya sebelumnya saya ingin di Komisi hukum yakni Komisi III, namun sebagai petugas partai saya siap ditempatkan dimana saja. Dan InsyaAllah saya akan terus menjaga amanah rakyat khususnya yang berada di Dapil saya ini, tentunya dengan doa dari semuanya," pungkasnya. ■

(Ayul), foto: Jaka/hr



Indonesia Perlu Terapkan Wisata Halal

Anggota Komisi X DPR RI, Dadang Rosdiana menilai Indonesia perlu menetapkan halal *tourism* atau wisata halal di Indonesia, termasuk di Aceh. Hal tersebut diungkapkannya saat mengunjungi Pulau Sabang, Aceh baru-baru ini.

"Sepuluh persen wisatawan di dunia itu merupakan umat muslim, baik wisatawan domestik maupun wisatawan mancanegara khususnya dari negara-negara Asia. Kenyataan itu sejatinya sebuah peluang bagus bagi Indonesia membuat halal *tourism* atau wisata halal," ungkap Dadang.

Wisata halal yang dimaksud disini, lanjut Dadang, bukan berarti harus dengan mengenakan hijab dan berganti busana gamis. Namun lebih kepada memberikan rasa aman dan nyaman bagi umat muslim dalam berwisata, misalnya dengan menyediakan berbagai fasilitas umat muslim

untuk beribadah seperti mushala dan masjid. Memastikan seluruh makanan yang disajikan di tempat wisata tersebut halal.

"Selama ini Malaysia mengambil peluang itu dengan menerapkan wisata halal. Sementara di Indonesia yang mayoritasnya umat muslim malah belum menerapkannya,"ujarnya.

Senada dengan Dadang, Walikota Sabang yang ikut mendampingi Tim Kunjungan Kerja Komisi X DPR RI, Zulkifli H Adam mengatakan bahwa pihaknya juga menilai pentingnya wisata halal diterapkan di daerah tersebut. Selama ini pun dikatakan Zulkifli, daerah tersebut dikenal dengan kehalalannya.

Bahkan tidak jarang terjadi salah persepsi, bahwa ketika berada di Sabang semua wanita (baik itu muslim dan non muslim-red) harus mengenakan hijab atau

jilbab. Padahal hal tersebut tidak seutuhnya benar.

"Selama ini malah sering terjadi salah persepsi, jika berada di Sabang semua wanita langsung berhijab. Itu tidak seutuhnya benar. Dan kami setuju dengan wisata halal yang dimaksud. Membuat rasa aman dan nyaman umat muslim saat berwisata, baik lewat makanannya dan ruang ibadahnya,"pungkas Zulkifli. ■



Ketua Komisi X DPR Teuku Riefky Harsya ketika memimpin kunjungan ke Aceh

(Ayu), foto: ayu/hr.

Kementerian PU Diminta Koordinasi dengan Pemda Masalah Ganti Rugi Tanah

Pembangunan Tol Medan-Binjai Seksi I di Kota Medan terkendala masalah ganti rugi tanah. Terkait hal tersebut, Wakil Ketua Komisi V DPR Muhidin M. Said minta Kementerian Pekerjaan Umum untuk berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Sumatera Utara menyelesaikan masalah ini.

"Pembangunan jalan tol Medan-Binjai menurut saya pekerjaan-pekerjaannya sudah sesuai target yang ada terutama di Seksi III," kata Muhidin saat Tim Komisi V DPR meninjau pembangunan Jalan Tol Medan-Binjai di Seksi III Medan, Senin (02/05)

Menurutnya, yang menjadi kendala adalah pada saat pembangunan di Seksi III yaitu di Kota Medan, ada kendala masalah ganti rugi tanah.

"Terkait masalah ini akan kami sampaikan kepada Gubernur Sumut dan Walikota Medan, besok saat pertemuan (hari ini.red). Karena sudah ada kesiapan



Tim Kunker Komisi V Tinjau Pembangunan Tol Medan-Binjai

untuk ikut bersama-sama dengan Kementerian PU khususnya pelaksana pekerjaan yaitu PT. Hutama Karya," papar anggota DPR dari Dapil Sulawesi Tengah.

Ia mengharapkan antara Kementerian PU dan Pemda bersama-sama berkoordinasi untuk melakukan pendekatan kepada masyarakat dalam rangka ganti rugi tanah. Terutama mengenai bagaimana memindahkan masyarakat yang sudah lama tinggal di sana, karena tanah tersebut milik PTPN II dan PT. KAI.

"Saya kira antara BUMN-BUMN ini tidak

ada masalah, tapi yang menjadi masalah adalah masyarakat penggarap yang sudah puluhan tahun tinggal di situ dan harus direlokasi," ungkapnya.

Jalan Tol Medan-Binjai adalah jalan tol sepanjang 16,8 kilometer yang akan menghubungkan dua kota di Sumatera Utara, Indonesia: Medan dan Binjai.

Peresmian pembangunan jalan tol ini dilakukan pada 10 Oktober 2014 oleh Menko Perekonomian Chairul Tanjung.

Pembangunan jalan tol ini direncanakan berlangsung 3 tahun.

Jalan tol Medan-Binjai akan membagi beban kendaraan dengan Jalan Medan-Binjai yang merupakan salah satu ruas terpadat jalan Raya Lintas Sumatera yang menghubungkan Medan dan Banda Aceh.

Jalan tol ini akan menyambung dengan jalan tol Belmera yang telah ada sebelumnya di sekitar pintu tol Tanjung Mulia, lalu menyusuri kawasan Medan Helvetia, Sei Semayang dan sampai ke jalan lingkar luar kota Binjai sebagai titik akhir. ■

(sc) foto: suci/hr



Pemerintah dan Masyarakat Perlu Awasi Pulau-pulau Dijual ke Orang Asing

Anggota Komisi X DPR Mujib Rohmat mengingatkan, jangan sampai ada pulau-pulau yang dijual atau dikuasai orang asing dengan bermacam-macam modus. Pemerintah harus memperhatikan masalah ini sebab modus yang dilakukan diantaranya mengawini orang lokal kemudian membeli sebuah pulau.

Hal itu dikatakannya se usai mengunjungi Kepulauan Karimunjawa Jumat (22/4) lalu. "Pemerintah dan masyarakat harus memberikan kontrolnya terhadap pulau-pulau potensial itu supaya jangan sampai beralih kepemilikan. Apalagi kita sedang menggenjot sektor pariwisata untuk berkontribusi dalam APBN yang lebih memadai," tegasnya.

Politisi Partai Golkar dari Dapil Jateng ini juga menyoroti masih kecilnya anggaran sektor pariwisata di daerah. Anggaran yang dikucurkan mulai 2008 sampai 2016 itu jumlahnya hanya 0,010 dari APBD sehingga perlu mendapatkan perhatian apalagi ke



Anggota Komisi X DPR Mujib Rohmat didampingi Nuroji dan Moreno Soeprapto berjabat tangan dengan Camat Karimunjawa

depan sektor pariwisata menjadi andalan pemasukan devisa.

Karena itu dia berharap, Gubernur yang mempunyai pulau-pulau potensial untuk wilayah destinasi, akan kelihatan dari sudut anggarannya. "Kita ingin menggunakan istilah *money follow activity*. Kalau aktivitasnya besar mestinya anggarannya juga besar. Karena Karimunjawa sudah masuk wilayah destinasi yang dikembangkan, maka partisipasi anggaran lokal harus mendapatkan perhatian. Apalagi Karimunjawa ada 27 pulau

dan baru 5 pulau dihuni," ungkap Mujib.

Puji Djuharnoto selaku Kepala Balai Pelayanan Informati Pariwisata Pemprov Jateng yang mendampingi Tim Kunspek Komisi X dalam pelayaran dari Semarang ke Karimunjawa mengakui, adanya pulau yang telah dibeli orang asing yaitu Pulau Menyawakan. Kepulauan Karimunjawa terdiri 27 pulau, baru 5 pulau yang berpenghuni.

Karimunjawa merupakan wilayah Kecamatan terdiri lima yaitu desa Karimunjawa, desa Kemujang, Parang, Nyamuk dan desa Genting. Masing-masing pulau berjauhan, seperti dari Karimunjawa ke Parang perlu waktu dua jam dengan kapal cepat.

Kendala daerah ini adanya dua musim yang sangat tidak bisa ditoleransi, pertama musim barat Januari-Maret biasanya muncul angin barat mengakibatkan Karimunjawa menjadi pulau yang padam. Lalu musim timur ketika itu angin kencang dari arah Timur sampai Juni-September terjadi gelombang besar. ■

(mp).Foto: Mastur/hr

Kerja Sama Regional Jadi Perhatian DPR

Anggota delegasi DPR RI Abdul Kadir Karding menilai positif pelaksanaan Asia-Europe Parliamentary Partnership Meeting (ASEP) di Mongolia, Jumat (22/4) lalu. Partisipasi DPR dalam pertemuan anggota parlemen se-Asia dan Eropa menurutnya sebagai bentuk dukungan pada kerja sama regional.

"DPR RI mendukung terselenggaranya kerja sama antar kawasan melalui partisipasi aktif DPR RI dalam beragam forum antarparlemen. Hal ini menunjukkan komitmen Indonesia terhadap mekanisme kerja sama regional," ujar dia disela-sela pelaksanaan sidang.

Politisi Fraksi PKB Abdul Kadir Karding menambahkan salah satu agenda penting yang perlu mendapat perhatian seluruh negara di Asia dan Eropa adalah tercapainya pembangunan berkelanjutan - Sustainable Development Goals (SDGs).

Target tersebut tidak akan tercapai tanpa upaya bersama dalam menjaga stabilitas dan keamanan.

Di era globalisasi, kesempatan ekonomi semakin terbuka lebar. Namun demikian, kebebasan arus barang, jasa, dan tenaga kerja juga dapat meningkatkan resiko terjadinya kejahatan lintas batas negara. Oleh karena itu, diperlukan penegakan hukum yang terintegrasi, khususnya untuk menangani isu-isu terorisme, penyelundupan narkoba, dan perdagangan manusia.

Pada bagian lain ia mengingatkan kemitraan antara Asia dan Eropa harus berlandaskan kesetaraan. Tidak kalah penting menurutnya upaya melibatkan



Delegasi Indonesia Abdul Kadir Karding di Sidang ASEP ke-9 di Mongolia

generasi muda dalam sejumlah agenda pembangunan berkelanjutan.

"Manfaat dari tujuan pembangunan berkelanjutan harus dapat dirasakan oleh seluruh elemen masyarakat. Oleh karena itu, keterlibatan generasi muda dalam mengurangi angka kemiskinan, harus ditingkatkan," demikian Karding. ■

(BKSAP/mp).Foto: Hamdis/hr



Pansus Pelindo Temukan Kejanggalan Proyek Kalibaru

Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket tentang Pelindo II DPR menemukan sejumlah kejanggalan terkait pembangunan Pelabuhan Kalibaru atau yang lebih dikenal dengan *New Priok*. Dalam kunjungan lapangan tersebut, Pansus menemukan beberapa kejanggalan, seperti mundurnya waktu operasional Pelabuhan Kalibaru, komposisi direksi yang tidak sesuai kontrak, penjualan saham secara diam-diam, serta regulasi reklamasi.

"Pertama, sebagaimana yang kita tahu bahwa *New Port* ini akan segera dilaksanakan pada bulan Januari 2015, tetapi ternyata mundur. Kedua, ketika dikonsesi oleh Mitsui, kita punya lima direksi, yakni tiga dari Pelindo dan dua dari Mitsui, karena Pelindo memiliki saham 51% sedangkan Mitsui 49%. Nah, seiring berjalan waktu ternyata direksi ini terbalik, Mitsui-nya tiga, IPC-nya justru dua. Ini harus dijawab apa masalahnya," tegas Irma Suryani Anggota Pansus Pelindo II, Selasa (27/04), di Pelabuhan Kalibaru, Jakarta.

Selanjutnya, politisi Nasdem itu menambahkan, yang menjadi perhatian khusus adalah informasi bahwa Mitsui



Tim Pansus Pelindo II Kunlap Terkait Pembangunan Terminal Peti Kemas Kalibaru

menjual sebagian sahamnya kepada Port Authority of Singapore. Padahal, awalnya IPC atau Indonesia Port Corporation tidak ingin menjual saham Pelindo II kepada Singapura, lantaran khawatir proyek tersebut tidak akan dikembangkan.

"Takut kalah dengan Indonesia, sehingga IPC tidak mau memberikan konsesi itu kepada Singapura. Tetapi, kenapa di tengah jalan justru sahamnya dijual ke Singapura. Ini, kan, tanda tanya besar, ada apa Mitsui dengan Singapura," kritik Irma.

Sementara itu anggota Pansus lainnya

I Putu Sudiartana (F-Demokrat) mempertanyakan pengadaan alat dan barang dalam kontrak *multiyears*. Menurutnya, hal itu perlu ditelusuri lebih lanjut oleh Pansus, karena diduga ada pelanggaran Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

"Sudah sesuai kontrak atau tidak. Tadi dikatakan bahwa Mitsui yang melakukan pengadaan barang, kemudian dikerjakan oleh Mitsui pula. Ini ada apa? Jelas tidak sesuai dengan Perpres," tegas Putu.

Hal senada disampaikan oleh Ketua Pansus Rieke Diah Pitaloka terkait regulasi reklamasi beserta temuan-temuan tersebut. Pansus, kata Rieke, akan memanggil beberapa menteri terkait, seperti Menteri Lingkungan Hidup, Menteri Perhubungan, serta Pemerintah Provinsi DKI.

"Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang baru kami terima hanya IMB gardu listrik, sisanya tanpa IMB. Apakah memang aturannya seperti itu? Nanti kita akan telusuri," ujar politisi PDI Perjuangan itu. ■

(ann,mpj), Foto: anief/hr

Amelia Anggraini : Kenaikan Iuran Bukan Solusi

Anggota Komisi IX DPR RI Amelia Anggraini menegaskan, kenaikan iuran untuk menutupi defisit bukan solusi atau jalan keluar, namun perlu dicari akar permasalahan yang ada di BPJS.

"Kalau misalnya iuran dinaikan tetapi akar permasalahannya tidak diselesaikan sampai kapan iuran ini akan dinaikan terus, banyak permasalahan BPJS yang harus diselesaikan salah satunya jumlah kepesertaan yang tidak berbanding dengan infrastruktur kesehatan," ujarnya di Gedung Nusantara I, DPR, Jakarta, Kamis (21/4).

Lebih lanjut ia mengatakan, masalah INACBG's yang harus di review ulang, belum lagi tidak patuhnya peserta dalam membayar iuran, kemudian upaya preventif dan

promotif untuk penyakit katastrofik tidak berjalan sebagaimana mestinya.

"Salah satunya yang kita dorong adalah menambah Peserta Penerima Upah (PPU), karena masih banyak perusahaan yang karyawannya belum menjadi peserta BPJS Kesehatan, padahal subsidi bisa berjalan kalau kepesertaan seimbang. Fasilitas dan pelayanan juga perlu diperbaiki untuk menambah kepesertaan," kata Amel.

"Karena Fasilitas dan pelayanan menjadi



Anggota Komisi IX DPR RI Amelia Anggraini

pertimbangan seseorang untuk menjadi peserta, kita akan mendorong jangan sampai ada lagi pasien di 'oper-oper' karena ketersediaan tempat tidur kurang, akses pelayanan kesehatan yang susah dan lain sebagainya," tambahnya.

Dalam Hal ini, politisi F-Nasdem ini menegaskan, Panja BPJS Kesehatan dan PBI

ini sedang mencari solusi-solusi yang nantinya akan diberikan kepada pemerintah sebagai referensi agar program JKN dapat berkesinambungan dan menjadi program andalan pemerintah kedepan. ■

(mm), foto: Jayadi/hr

Komisi VIII Kecewa Mangkraknya Pembangunan Embarkasi Asrama Haji Sumbar

Komisi VIII DPR RI kecewa dan prihatin melihat pembangunan asrama haji embarkasi Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) yang berlokasi di Sungai Buluh, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, Jum'at (22/4). Pasalnya, asrama haji embarkasi Provinsi Sumbar yang pembangunannya ditandai dengan



Tim Kunjungan Spesifik Komisi VIII DPR saat meninjau pembangunan asrama haji embarkasi Sumbar

peletakan batu pertama oleh Menteri Agama RI Lukman Hakim Syaifuddin, Senin (11 Mei 2015) lalu ditargetkan selesai tahun 2017.

Pembangunan diatas lahan seluas 10 hektar, itupun direncanakan dalam tahun ini sudah rampung 90 persen. Namun apa yang ditemui rombongan Komisi VIII DPR RI saat meninjau langsung kelokasi, ternyata hanya tonggak-tonggak dan rangka bangunan saja yang terlihat.

Anggota Komisi VIII DPR, Mhd Asli Chaidir (F-PAN) menanyakan kendala apa sebenarnya. Apakah kontraktor tidak benar atau bagaimana. "Anggaran pembangunan sudah ada sebesar Rp 100 Miliar, kok cuma hanya tonggak-tonggak tiang yang berdiri," ujarnya dengan menambahkan, ini perlu dipelajari dan didalami, kenapa bisa terbengkalai pembangunan ini.

Sedangkan anggota Komisi VIII DPR Itet Tridjajati Sumarjianto dari F-PDIP menanyakan bagaimana dengan Amdalnya. "Anggaran untuk pembuatan Amdal pasti ada kan," tanya dia.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kakanwil Kemenag) Provinsi Sumbar, Salman K Memed mengutarakan, pembangunan asrama haji terhenti karena pihak kontraktor PT. Ratu Karya (PT. RK) tidak membayarkan kewajibannya kepada masyarakat Sungai Buluh terkait pengadaan material bangunan dan gaji pekerja. Di sisi lain, anggaran yang awalnya dianggarkan Rp

100 Miliar namun hanya bisa terserap setengahnya.

Lebih lanjut Salman menjelaskan, proses perencanaan serta persiapan hingga persoalan Amdal memakan waktu yang panjang, hingga menyisakan waktu penyelesaian pembangunan hanya tiga bulan. "Dengan waktu yang hanya tersisa tiga bulan ini, anggaran yang bisa terserap hanya Rp 48 Miliar, dan sisa anggaran itu dikembalikan ke Kas Negara," ungkapnya.

Sementara ditempat yang sama, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pembangunan asrama haji, Efrizal menjelaskan pokok permasalahannya. Menurutnya, semua upaya sudah dilakukan Kementerian Agama Provinsi Sumbar untuk membantu menyelesaikan permasalahan ini, termasuk memfasilitasi pertemuan antara pihak leveransir dengan kontraktor. Hutang kontraktor yang mencapai Rp 14 Miliar sudah dibayarkan berupa cek. Tapi cek tersebut tidak bisa dicairkan dengan alasan terjadi pergantian Direktur BRI sebagai bank penjamin sehari sebelum batas akhir pencairan cek. Sehingga Kepala BRI Cabang Soekarno-Hatta sebagai tempat pencairan cek tidak berani menguangkan cek tersebut.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR, Deding Ishak setelah mendengarkan penjelasan dari Kakanwil Kemenag Provinsi Sumbar dan PPK pembangunan asrama haji, berjanji akan membantu menyelesaikan

permasalahan ini. "Nanti akan kami undang dan duduk bersama antara pihak-pihak terkait guna menyelesaikan permasalahan ini agar tidak berlarut-larut," ungkapnya.

Mengenai proses pengadaan pembangunan, sambungnya, tidak ada permasalahan karena semua sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku. "Tinggal menyelesaikan permasalahan antara kontraktor dengan leveransir saja," tambahnya.

Terkait kelanjutan pembangunan asrama haji, Komisi VIII DPR akan membahas untuk mengusahakan tambahan anggaran di tingkat Pusat agar pembangunan asrama haji ini bisa selesai. Memang ini proyek monumental dengan biaya yang cukup besar, tentu kita menekankan proses transparansi dan akuntabilitas dari pelaksanaan proyek ini jangan sampai menimbulkan masalah. "Insya Allah, akan memberi manfaat bagi umat Islam di Provinsi Sumbar ini," tutupnya.

Tim Kunjungan Spesifik Komisi VIII dipimpin Wakil Ketua Komisi VIII Deding Ishak, didampingi Wakil Ketua Komisi VIII Ledia Amaliah dan anggota Komisi VIII lintas fraksi yakni Itet Tridjajati Sumarjianto dan Agus Susanto (F-PDIP), Firmandez (F-PG), Anda (F-Gerindra), Khatibul Umam Wiranu (F-PD), Mhd Asli Chaidir (F-PAN), Arzeti Bilbina (F-PKB), Achmad Mustaqim (F-PPP). ■

(i/w), Foto: iwan/iw



BERITA BERGAMBAR



Tim Pansus Pelindo II melakukan kunjungan lapangan untuk memperoleh informasi terkait pembangunan Terminal Peti Kemas Kalibaru, Selasa (26/4) Foto: Arief/hr



Tim Kunspek Komisi VIII DPR RI tinjau Proyek Pembangunan Asrama Haji di Kabupaten Padang Pariaman dipimpin Wakil Ketua Komisi VIII Deding Ishak. Jumat, (22/4) foto : Iwan/iw



Tim Kunspek Komisi IV DPR RI tinjau Lokasi Penangkaran Burung Jalak Bali di Taman Nasional Bali Barat, Buleleng, dipimpin Wakil Ketua Komisi IV Daniel Johan. Selasa, (26/4) foto : Iwan/iw